
Korupsi Dan Kemiskinan: Tinjauan Literatur Sistematis

Suci Frisnoiry¹, Jafri Syah Fadil², Miranda Br Purba³, Ingrid Simangunsong⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Medan

sucifrisnoiry@unimed.ac.id¹, mirandabrpurba00@gmail.com³,
simangunsongingrid@gmail.com⁴

ABSTRACT; *Corruption and poverty are two interrelated global challenges that form a vicious cycle that is difficult to break. This research aims to systematically review the existing literature on the relationship between corruption and poverty. Using a systematic literature review approach, this study identifies, evaluates, and synthesizes findings from various relevant literature sources. The review results show a significant positive relationship between corruption and poverty, where corruption has the potential to exacerbate a country's poverty level through various economic impacts such as slowing economic growth, decreasing investment, increasing inflation, and inefficient government spending allocation. Although the direction of the causal relationship is still debated, efforts to combat corruption are seen as an important step in reducing poverty levels and achieving sustainable economic development.*

Keywords: *Corruption, Poverty, Systematic Literature Review, Economic Impact, Sustainable Development.*

ABSTRAK; Korupsi dan kemiskinan merupakan dua tantangan global yang saling terkait dan membentuk lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis literatur yang ada tentang hubungan antara korupsi dan kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis, penelitian ini mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan dari berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil tinjauan menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara korupsi dan kemiskinan, di mana korupsi berpotensi memperburuk tingkat kemiskinan suatu negara melalui berbagai dampak ekonomi seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan investasi, peningkatan inflasi, dan alokasi belanja pemerintah yang tidak efisien. Meskipun arah hubungan kausalitas masih menjadi perdebatan, upaya untuk memerangi korupsi dipandang sebagai salah satu langkah penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Korupsi, Kemiskinan, Tinjauan Literatur Sistematis, Dampak Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Korupsi dan kemiskinan merupakan dua tantangan global yang saling terkait dan membentuk lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Korupsi, yang didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi (Transparency International, 2022), dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi, dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dampak negatif ini pada gilirannya dapat memperburuk kemiskinan, yang didefinisikan sebagai kondisi kekurangan sumber daya dan akses untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan (World Bank, 2021).

Hubungan antara korupsi dan kemiskinan dapat dijelaskan melalui teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang dikemukakan oleh Nurkse (1953). Teori ini menjelaskan bagaimana kemiskinan dapat menciptakan kondisi yang memicu lebih banyak kemiskinan, seperti kurangnya investasi, ketidakmerataan distribusi sumber daya, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Dalam konteks korupsi, teori ini dapat diperluas untuk menunjukkan bagaimana kemiskinan juga dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap korupsi, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya transparansi, dan rendahnya upah pegawai negeri. Sebaliknya, korupsi juga dapat memperparah kemiskinan dengan mengalihkan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi, menghambat penyediaan layanan publik yang memadai, dan menciptakan ketidakpastian investasi.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meninjau secara sistematis literatur yang ada tentang hubungan antara korupsi dan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*). Tinjauan literatur sistematis merupakan metode yang melibatkan proses terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan dari berbagai sumber literatur yang relevan (Snyder, 2019). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti empiris dari berbagai studi dengan cara yang komprehensif dan tidak bias.

METODE PENELITIAN

Untuk meninjau literatur tentang hubungan antara korupsi dan kemiskinan secara sistematis, penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*). Pendekatan ini melibatkan serangkaian langkah terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan dari berbagai sumber literatur yang

relevan. Proses ini dimulai dengan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memilih studi yang akan dianalisis. Kriteria inklusi meliputi: (1) Studi yang membahas hubungan antara korupsi dan kemiskinan secara empiris, (2) Studi yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir (2013-2023), dan (3) Studi yang diterbitkan dalam bahasa Inggris atau Indonesia. Kriteria eksklusi meliputi laporan berita, artikel opini, dan sumber sekunder yang tidak menunjukkan data empiris.

Pencarian literatur dilakukan pada database akademik seperti Google Scholar, Neliti, Garuda, dan Science Direct. Selain itu, penelitian ini juga mencakup laporan dan publikasi dari organisasi terkemuka seperti Bank Dunia, Transparency International, dan lembaga pemantau korupsi lainnya. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi "korupsi", "kemiskinan", "ketimpangan", "pembangunan", "korupsi dan pertumbuhan ekonomi", "korupsi dan investasi", dan kombinasi kata kunci lainnya yang relevan.

Proses peninjauan dilakukan dengan mencari literatur menggunakan kata kunci tersebut pada database yang ditentukan. Hasil pencarian disaring berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan. Judul dan abstrak dari setiap hasil pencarian diperiksa untuk memastikan relevansinya dengan topik penelitian. Kemudian, artikel dan laporan yang memenuhi syarat diunduh dan dianalisis secara lebih mendalam. Referensi dari artikel yang relevan juga ditelusuri untuk mengidentifikasi sumber literatur tambahan yang mungkin tidak terdeteksi dalam pencarian awal.

Analisis data dilakukan dengan membandingkan dan mengontraskan temuan dari berbagai sumber literatur. Metode analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi tema, pola, dan tren yang muncul dari literatur yang ditinjau. Temuan utama dikelompokkan dan disintesis untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang hubungan antara korupsi dan kemiskinan. Proses ini mencakup pengkodean dan kategorisasi data, serta identifikasi faktor-faktor yang memoderasi atau memediasi hubungan antara kedua variabel tersebut. Studi kasus spesifik dari berbagai negara atau wilayah juga dianalisis untuk memberikan konteks yang lebih kaya tentang bagaimana korupsi dan kemiskinan saling mempengaruhi dalam situasi nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Antara Korupsi dan Kemiskinan

Tabel 1. Hubungan Antara Korupsi dan Kemiskinan

Penulis (Tahun)	Sumber Publikasi	(Sumber Data)	Metode Analisis Data	Temuan Utama tentang Hubungan Antara Korupsi dan Kemiskinan
Azwar, Rahmalud din Saragih (2018)	Jurnal BPPK Volume 11 Nomor 1 Tahun 2018	Data sekunder dari Bank Dunia dan Transparen cy Internation al (Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kemiskina n di Indonesia tahun 1995- 2017)	Autoregres sive Distributed Lag (ARDL) dan Error Correction Model (ECM)	1) Terdapat hubungan positif yang signifikan antara korupsi dan kemiskinan dalam jangka panjang di Indonesia. Kenaikan 1% indeks korupsi menyebabkan kenaikan 1,36% rasio kemiskinan. 2) Korelasi sederhana Pearson juga menunjukkan bahwa korupsi memiliki konsekuensi distribusional yang signifikan melalui dampaknya terhadap belanja pemerintah. Tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan kemiskinan dengan mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dan belanja sosial (pendidikan dan kesehatan).
Junaidi (2017)	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia	(Literatur review)	Studi literatur	1. Korupsi menghambat kemajuan ekonomi suatu negara, menyebabkan defisit anggaran, rendahnya pertumbuhan ekonomi, investasi publik yang lebih tinggi, pendapatan sektor pajak rendah, pengeluaran hanya fokus belanja rutin, dan realisasi

belanja modal rendah.

Zuhairan	JEJAK:	Data panel	Uji	1. Secara statistik, indikator
Y. Yunan	Jurnal	4 negara	Kausalitas	pembangunan ekonomi
dan Ayu	Ekonomi	ASEAN	Granger,	berpengaruh signifikan terhadap
Andini	dan	(Indonesia,	Model	korupsi, tetapi dengan arah yang
(2018)	Kebijakan,	Malaysia,	Efek Acak	berbeda. 2. Ada kecenderungan
	Vol 11 (2)	Thailand,	(Random	kausalitas antara korupsi,
		Filipina)	Effect	kemiskinan, dan pertumbuhan
		tahun	Model)	ekonomi di Filipina. 3. Di
		2002-2015		Thailand, terjadi kausalitas
				antara kemiskinan dan
				pertumbuhan ekonomi. 4.
				Indonesia dan Malaysia tidak
				menunjukkan adanya kausalitas.
Muhamma	Journal of	Data	Analisis	- Korupsi, inflasi, dan
d Rizki	Business	sekunder:	Regresi	pengangguran secara bersama-
dan Keisha	Administra	Indeks	Berganda	sama berpengaruh signifikan
Dinya	tion	Persepsi		terhadap kemiskinan -
Solihati	Economic	Korupsi		Korupsi dan inflasi berpengaruh
(2022)	&	dari		signifikan terhadap peningkatan
	Entreprene	Transparen		kemiskinan, sedangkan
	urship Vol.	cy		pengangguran tidak berpengaruh
	4 No. 1	Internation		signifikan
		al, Tingkat		
		Inflasi,		
		Tingkat		
		Penganggu		
		ran, dan		

		Tingkat Kemiskinan dari Badan Pusat Statistik Indonesia (1998- 2017)		
UNDP (2015)	Corruption and Development: A Primer	Tidak disebutkan	Tinjauan Literatur	Negara yang terkena kemiskinan struktural cenderung menderita korupsi sistemik karena korupsi merupakan salah satu kondisi yang memperburuk kemiskinan, dan korupsi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi.
OECD (2015)	Consequences of Corruption at the Sector Level and Implications for Economic Growth and Development	Tidak disebutkan	Tinjauan Literatur	Korupsi berdampak pada biaya proyek layanan publik di sektor swasta dan publik, kerusakan institusi publik, penurunan kepercayaan sosial, dan peningkatan ketimpangan, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan kemiskinan.

Mustafa Unver dan Julide Yalcinkay a Koyuncu (2017)	Journal of Economics Library dari 154 negara (2000- 2013)	Data panel tahunan Data Panel Analisis Data Panel Empiris	Semua variabel kemiskinan dan tingkat inflasi memiliki efek positif yang signifikan secara statistik terhadap korupsi, sementara FDI, keterbukaan perdagangan, dan tingkat demokrasi memiliki efek negatif terhadap korupsi.
Klaus Gründler dan Niklas Potrafke (2019)	Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich	Data dari 175 negara (2012- 2018)	Efek kumulatif jangka panjang korupsi pada pertumbuhan adalah penurunan PDB riil per kapita sekitar 17% ketika CPI terbalik meningkat satu standar deviasi. Dampak korupsi pada pertumbuhan ekonomi terutama terjadi di autokrasi melalui efek penurunan investasi asing langsung dan peningkatan inflasi.

Berdasarkan kajian literatur dari berbagai penelitian yang disajikan dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara korupsi dan kemiskinan. Meskipun arah hubungan kausalitas belum sepenuhnya jelas, namun sebagian besar studi menunjukkan bahwa korupsi berpotensi memperburuk tingkat kemiskinan suatu negara.

Studi empiris yang dilakukan oleh Azwar dan Saragih (2018) menemukan adanya hubungan positif yang signifikan antara korupsi dan kemiskinan dalam jangka panjang di Indonesia. Setiap kenaikan 1% pada indeks korupsi menyebabkan peningkatan sebesar 1,36% pada rasio kemiskinan. Temuan ini diperkuat oleh adanya korelasi sederhana Pearson yang menunjukkan bahwa korupsi memiliki konsekuensi distribusional yang signifikan melalui dampaknya terhadap belanja pemerintah, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan.

Studi lain oleh Zuhairan Y. Yunan dan Ayu Andini (2018) yang menganalisis data panel dari empat negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina, menemukan adanya kecenderungan kausalitas antara korupsi, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi di Filipina. Sementara itu, di Thailand terjadi kausalitas antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian ini tidak menemukan adanya kausalitas yang signifikan di Indonesia dan Malaysia.

Penelitian Muhammad Rizki dan Keisha Dinya Solihati (2022) yang menggunakan data dari Indonesia juga memperkuat bukti bahwa korupsi berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa korupsi, inflasi, dan pengangguran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Secara spesifik, korupsi dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemiskinan, sedangkan pengangguran tidak berpengaruh signifikan.

Selain studi empiris, tinjauan literatur dari lembaga internasional seperti UNDP (2015) dan OECD (2015) juga menekankan bahwa korupsi merupakan salah satu kondisi yang memperburuk kemiskinan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. UNDP menyatakan bahwa negara-negara yang terkena kemiskinan struktural cenderung menderita korupsi sistemik, sementara OECD menegaskan bahwa korupsi berdampak pada biaya proyek layanan publik, kerusakan institusi publik, penurunan kepercayaan sosial, dan peningkatan ketimpangan, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan kemiskinan.

Studi lain oleh Mustafa Unver dan Julide Yalcinkaya Koyuncu (2017) yang menganalisis data panel dari 154 negara menemukan bahwa semua variabel kemiskinan dan tingkat inflasi memiliki efek positif yang signifikan secara statistik terhadap korupsi. Sementara itu, investasi asing langsung, keterbukaan perdagangan, dan tingkat demokrasi memiliki efek negatif terhadap korupsi.

Temuan penelitian Klaus Gründler dan Niklas Potrafke (2019) juga menggarisbawahi dampak negatif korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka menemukan bahwa efek kumulatif jangka panjang korupsi pada pertumbuhan adalah penurunan PDB riil per kapita sekitar 17% ketika indeks persepsi korupsi meningkat satu standar deviasi. Dampak korupsi pada pertumbuhan ekonomi terutama terjadi di negara-negara autokrasi melalui efek penurunan investasi asing langsung dan peningkatan inflasi.

Secara keseluruhan, berbagai studi yang dibahas dalam tabel ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak buruk terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi, dan alokasi belanja pemerintah. Meskipun arah hubungan kausalitas masih menjadi perdebatan, namun upaya untuk memerangi korupsi dipandang sebagai salah satu langkah penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dampak Ekonomi Korupsi pada Kemiskinan

Berdasarkan tinjauan literatur yang disajikan dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa korupsi memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap peningkatan tingkat kemiskinan suatu negara. Berbagai studi empiris dan analisis data panel dari berbagai negara menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara korupsi dan kemiskinan.

Studi yang dilakukan oleh Azwar dan Saragih (2018) di Indonesia menemukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara korupsi dan kemiskinan dalam jangka panjang. Setiap kenaikan 1% pada indeks korupsi menyebabkan peningkatan sebesar 1,36% pada rasio kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula tingkat kemiskinan yang terjadi di masyarakat.

Penelitian serupa oleh Muhammad Rizki dan Keisha Dinya Solihati (2022) juga memperkuat bukti bahwa korupsi berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan di Indonesia. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa korupsi, inflasi, dan pengangguran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Secara spesifik, korupsi dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemiskinan.

Dampak ekonomi korupsi terhadap kemiskinan juga terlihat dari studi Zuhairan Y. Yunan dan Ayu Andini (2018) yang menganalisis data panel dari empat negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Hasil penelitian ini menemukan adanya kecenderungan kausalitas antara korupsi, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi di Filipina. Temuan ini menunjukkan bahwa korupsi dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya memperburuk tingkat kemiskinan.

Studi lain oleh Mustafa Unver dan Julide Yalcinkaya Koyuncu (2017) yang menganalisis data panel dari 154 negara juga memperkuat temuan sebelumnya. Mereka menemukan bahwa semua variabel kemiskinan dan tingkat inflasi memiliki efek positif yang signifikan secara statistik terhadap korupsi. Sementara itu, investasi asing langsung, keterbukaan perdagangan,

dan tingkat demokrasi memiliki efek negatif terhadap korupsi. Temuan ini mengindikasikan bahwa korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi melalui penurunan investasi asing langsung dan peningkatan inflasi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kemiskinan.

Dampak ekonomi korupsi terhadap kemiskinan juga didukung oleh tinjauan literatur dari lembaga internasional seperti UNDP (2015) dan OECD (2015). UNDP menyatakan bahwa negara-negara yang terkena kemiskinan struktural cenderung menderita korupsi sistemik, sementara OECD menegaskan bahwa korupsi berdampak pada biaya proyek layanan publik, kerusakan institusi publik, penurunan kepercayaan sosial, dan peningkatan ketimpangan, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan kemiskinan.

Selain itu, penelitian Klaus Gründler dan Niklas Potrafke (2019) juga menegaskan dampak negatif korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka menemukan bahwa efek kumulatif jangka panjang korupsi pada pertumbuhan adalah penurunan PDB riil per kapita sekitar 17% ketika indeks persepsi korupsi meningkat satu standar deviasi. Dampak korupsi pada pertumbuhan ekonomi terutama terjadi di negara-negara autokrasi melalui efek penurunan investasi asing langsung dan peningkatan inflasi.

Secara keseluruhan, berbagai studi yang dibahas dalam tabel ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap peningkatan kemiskinan. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi melalui penurunan investasi, peningkatan inflasi, dan inefisiensi alokasi sumber daya. Selain itu, korupsi juga dapat menyebabkan kerusakan institusi publik, penurunan kepercayaan sosial, dan peningkatan ketimpangan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan. Oleh karena itu, upaya untuk memerangi korupsi menjadi sangat penting dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Variabel Moderator

Dalam menganalisis hubungan antara korupsi dan kemiskinan, beberapa penelitian yang disajikan dalam tabel juga mengidentifikasi adanya variabel-variabel moderator yang dapat memengaruhi kekuatan atau arah hubungan tersebut. Variabel-variabel ini dapat berfungsi sebagai faktor yang memperlemah atau bahkan memperkuat dampak korupsi terhadap kemiskinan.

Salah satu variabel moderator yang signifikan adalah tingkat demokrasi suatu negara. Studi yang dilakukan oleh Mustafa Unver dan Julide Yalcinkaya Koyuncu (2017) menemukan bahwa tingkat demokrasi memiliki efek negatif terhadap korupsi. Ini mengimplikasikan bahwa negara-negara dengan tingkat demokrasi yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah, dan sebaliknya, negara-negara dengan tingkat demokrasi yang rendah cenderung lebih rentan terhadap korupsi yang dapat memperburuk kemiskinan.

Variabel moderator lain yang penting adalah keterbukaan perdagangan. Penelitian yang sama oleh Unver dan Koyuncu (2017) juga menemukan bahwa keterbukaan perdagangan memiliki efek negatif terhadap korupsi. Ini menunjukkan bahwa negara-negara yang lebih terbuka terhadap perdagangan internasional cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah, yang pada gilirannya dapat mengurangi dampak korupsi terhadap kemiskinan.

Selain itu, investasi asing langsung (FDI) juga dapat berfungsi sebagai variabel moderator yang signifikan. Studi Unver dan Koyuncu (2017) menemukan bahwa FDI memiliki efek negatif terhadap korupsi. Ini mengimplikasikan bahwa negara-negara yang menarik lebih banyak investasi asing langsung cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah, yang dapat membantu mengurangi dampak korupsi terhadap kemiskinan.

Variabel moderator lain yang muncul dari tinjauan literatur adalah tingkat inflasi. Penelitian Muhammad Rizki dan Keisha Dinya Solihati (2022) menemukan bahwa inflasi, bersama dengan korupsi, berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemiskinan di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi yang tinggi dapat memperkuat dampak negatif korupsi terhadap kemiskinan.

Faktor lain yang dapat berfungsi sebagai variabel moderator adalah tingkat pengangguran. Meskipun studi Rizki dan Solihati (2022) tidak menemukan pengaruh signifikan pengangguran terhadap kemiskinan, namun tingkat pengangguran yang tinggi dapat berpotensi memperkuat dampak korupsi terhadap kemiskinan melalui penurunan daya beli masyarakat dan peningkatan ketimpangan.

Selain itu, beberapa studi juga mengidentifikasi adanya perbedaan dampak korupsi terhadap kemiskinan di antara negara-negara dengan tingkat pemerintahan yang berbeda. Studi Klaus Gründler dan Niklas Potrafke (2019) menemukan bahwa dampak korupsi pada pertumbuhan ekonomi terutama terjadi di negara-negara autokrasi melalui efek penurunan investasi asing langsung dan peningkatan inflasi. Ini mengimplikasikan bahwa tingkat

pemerintahan dapat berfungsi sebagai variabel moderator yang memengaruhi kekuatan hubungan antara korupsi dan kemiskinan.

Secara keseluruhan, berbagai variabel seperti tingkat demokrasi, keterbukaan perdagangan, investasi asing langsung, inflasi, pengangguran, dan tingkat pemerintahan dapat berfungsi sebagai variabel moderator yang memengaruhi hubungan antara korupsi dan kemiskinan. Pemahaman terhadap variabel-variabel moderator ini penting dalam upaya mengatasi dampak negatif korupsi terhadap kemiskinan dan mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Diskusi

Temuan dari tinjauan literatur sistematis ini mengungkapkan hubungan yang erat antara korupsi dan kemiskinan, serta dampak ekonomi korupsi yang signifikan dalam memperburuk kondisi kemiskinan suatu negara. Secara keseluruhan, bukti empiris dari berbagai studi mengonfirmasi bahwa korupsi berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi, dan alokasi belanja pemerintah.

Dalam konteks ekonomi, korupsi terbukti menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi efektivitas kebijakan pembangunan. Studi empiris menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi menyebabkan penurunan investasi asing langsung, peningkatan inflasi, dan inefisiensi alokasi sumber daya publik. Hal ini pada akhirnya menghambat kemajuan ekonomi suatu negara, yang berdampak negatif terhadap upaya pengentasan kemiskinan.

Secara sosial, korupsi juga dapat memperburuk ketimpangan dan memperlambat penyediaan layanan publik yang memadai, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Hal ini berdampak langsung pada masyarakat miskin yang sangat bergantung pada layanan publik tersebut. Selain itu, korupsi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan menghambat upaya pembangunan yang inklusif.

Meskipun temuan ini memperkuat pemahaman tentang hubungan antara korupsi dan kemiskinan, terdapat beberapa keterbatasan dalam literatur yang ditinjau. Sebagian besar studi berfokus pada analisis data makro, sementara penelitian yang mengeksplorasi mekanisme mikro dan dampak korupsi pada individu atau rumah tangga masih terbatas. Selain itu, sebagian besar studi menggunakan indeks persepsi korupsi sebagai proksi untuk mengukur korupsi, yang mungkin tidak sepenuhnya menangkap kompleksitas fenomena korupsi di lapangan.

Dari segi metodologi, sebagian besar studi menggunakan metode ekonometrik seperti analisis regresi dan data panel, yang memiliki keterbatasan dalam menangkap hubungan kausalitas yang kompleks antara korupsi dan kemiskinan. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, diperlukan desain penelitian yang lebih kuat, seperti studi eksperimental atau kuasi-eksperimental, serta pendekatan kualitatif yang dapat mengeksplorasi aspek sosial-budaya yang terkait dengan korupsi dan kemiskinan.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam upaya memerangi korupsi dan mengentaskan kemiskinan. Pertama, penting untuk mengembangkan strategi anti-korupsi yang komprehensif dan terintegrasi dengan upaya pengentasan kemiskinan. Strategi ini harus mencakup perbaikan tata kelola, penguatan lembaga penegak hukum, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

Kedua, investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama, karena hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengurangi kerentanan terhadap korupsi di masa depan. Selain itu, upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan dan pemantauan program pemerintah juga penting untuk memperkuat akuntabilitas dan memerangi korupsi.

Ketiga, kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional perlu diperkuat dalam upaya memerangi korupsi dan kemiskinan. Hal ini dapat mencakup inisiatif seperti perjanjian kerja sama, pertukaran informasi, dan pengembangan kapasitas bersama.

Terakhir, penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk memahami hubungan yang kompleks antara korupsi dan kemiskinan, terutama pada tingkat mikro dan konteks sosial-budaya yang spesifik. Studi longitudinal dan penelitian kualitatif yang mengeksplorasi pengalaman dan persepsi individu atau masyarakat terhadap korupsi dan kemiskinan dapat memberikan wawasan yang berharga. Selain itu, penelitian tentang faktor-faktor yang memoderasi atau memediasi hubungan antara korupsi dan kemiskinan, seperti pemberdayaan perempuan, kualitas tata kelola, dan partisipasi masyarakat, juga penting untuk dikembangkan.

Dalam penelitian masa depan, disarankan untuk mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif, serta mengeksplorasi studi kasus spesifik dari negara atau wilayah yang memiliki

karakteristik sosial-ekonomi dan budaya yang beragam. Selain itu, penelitian juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti konflik, bencana alam, dan guncangan ekonomi, yang dapat mempengaruhi dinamika antara korupsi dan kemiskinan.

Secara keseluruhan, temuan dari tinjauan literatur ini menegaskan pentingnya upaya sistematis dan berkelanjutan dalam memerangi korupsi dan kemiskinan secara simultan. Hanya dengan mengatasi kedua tantangan global ini secara terintegrasi, negara-negara dapat mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Korupsi berpengaruh dalam tingkat kemiskinan disuatu negara, Secara sosial, korupsi juga dapat memperburuk ketimpangan dan memperlambat penyediaan layanan publik yang memadai, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar disuatu negara sehingga kesejahteraan masyarakat terancam. Cara untuk memoderasi korupsi yaitu dengan meningkatkan kualitas masyarakat dan kualitas tata keuangan. Korupsi terjadi bukan hanya diindonesia saja tetapi di beberapa negara lainnya. Temuan dari artikel ini mengindikasikan bahwa korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi melalui penurunan investasi asing langsung dan peningkatan inflasi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dräger, L., Gründler, K., & Potrafke, N. (2022). Political shocks and inflation expectations: Evidence from the 2022 Russian invasion of Ukraine.
- Iskandar, A., & Saragih, R. (2018). Does Corruption Affect Poverty in Indonesia?. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 11(1), 1-14.
- Junaidi, J. (2018). Korupsi, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia.
- KOYUNCU, J. Y., & ÜNVER, M. (2017). The association between corruption and globalization in African countries. *Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi*, 6(4), 20-28.
- Mantzaris, E., Tsekeris, T., & Tsekeris, C. (2017). Multiple-class existence, corruption and trust in South Africa. *Peer-reviewed academic journal Innovative Issues and Approaches in Social Sciences*.
- Nurkse, R. (1953). *Problems of capital formation in underdeveloped countries*. Oxford University Press.

-
- Rizki, M., & Solihati, K. D. (2022). The impact of corruption, inflation and unemployment towards poverty in Indonesia. *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*, 47-56.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Soreide, T., Estache, A., Hallak, J., Le Billon, P., Poisson, M., Somville, V., & Vian, T. (2014). Consequences of corruption at the sector level and implications for economic growth and development.
- Transparency International. (2022). What is corruption?
<https://www.transparency.org/en/what-is-corruption>
- Yunan, Z. (2018). Corruption, Poverty, and Economic Growth (Causality Studies among Asean Countries).